



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 651/SKB/BAN-PT/Akred/XI/2014

**Limitasi Perjanjian *African Growth and Opportunity Act* (AGOA)
2000-2015 Dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat & Sub-
Sahara Afrika**

Skripsi

Oleh

Nida Uljannah Maulani

2013330089

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 651/SKB/BAN-PT/Akred/XI/2014

**Limitasi Perjanjian *African Growth and Opportunity Act* (AGOA)
2000-2015 Dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat & Sub-
Sahara Afrika**

Skripsi

Oleh

Nida Uljannah Maulani

2013330089

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP, M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Nida Uljannah Maulani
Nomor Pokok : 2013330089
Judul : Limitasi Perjanjian *African Growth and Opportunity Act* (AGOA)
2000-2015 dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat – Sub-
Sahara Afrika

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 12 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Sekretaris

Giandi Kartasamita S.IP., M.A.

Anggota

1. Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Dr., M.A. :

2. Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nida Uljannah Maulani

NPM : 2013330089

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Limitasi Perjanjian *African Growth and Opportunity Act* (AGOA) 2000-2015 dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat – Sub-Sahara Afrika

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 03 Oktober 2017



Nida Uljannah Maulani

Abstrak

Nama : Nida Uljannah Maulani

NPM : 2013330089

Judul : Limitasi Perjanjian *African Growth and Opportunity Act* (AGOA) 2000-2015 dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat & Sub-Sahara Afrika

Penelitian ini menjelaskan *African Growth and Opportunity Act* (AGOA) sebagai landasan kebijakan ekonomi AS di Afrika. *African Growth and Opportunity Act* (AGOA) merupakan perjanjian perdagangan regional antara Amerika Serikat dan Sub-Sahara Afrika yang telah diratifikasi oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2000. Pemerintah AS membentuk AGOA sebagai program preferensi perdagangan untuk Sub-Sahara Afrika dengan menawarkan keuntungan yaitu kemudahan akses pasar dengan menghilangkan hambatan perdagangan. Tujuan AGOA adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membangun integrasi regional yang berorientasi pasar bebas serta meningkatkan arus perdagangan dan investasi. Perspektif neoliberalisme memandang perdagangan bebas sebagai cara yang baik guna mengalokasikan sumberdaya (modal, tenaga kerja) sehingga dapat mengatasi kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Pemerintah AS telah membuat kebijakan untuk merealisasikan program AGOA melalui badan representatif untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong produktifitas bagi para pebisnis di Sub-Sahara Afrika, akan tetapi beberapa negara penerima keuntungan merasa kesulitan untuk mendapat keuntungan. AGOA mendapatkan kritik atas limitasi perjanjian dalam penyediaan fasilitas perdagangan karena terikat dengan isu demokrasi dan HAM, perdagangan didominasi oleh komoditas minyak padahal AGOA berfokus untuk meningkatkan perdagangan agrikultur, tekstil dan pakaian, serta sistem keanggotaan dianggap terlalu eksklusif karena syarat negara penerima keuntungan sangat ketat.

Keyword : *African Growth and Opportunity Act* (AGOA), Amerika Serikat, Sub-Sahara Afrika, *Limtasi perjanjian*.

Abstract

Nama : Nida Uljannah Maulani

NPM : 2013330089

Judul : *The Limitations of African Growth and Opportunity Act (AGOA) 2000-2015 of the US Economic Approach to Sub-Saharan Africa*

This research describes African Growth and Opportunity Act (AGOA) as cornerstone toward America's economic policy in Africa. AGOA is an economic cooperation agreement between United State and Sub-Saharan Africa. AGOA was ratified by President George W. Bush in 2000. The US government created AGOA as preferential trade program for eligible country which include in beneficiary requirement to providing market access and removing trade barriers. The objective of AGOA is foster economic growth, established market-oriented in regional integration, and increase trade and investment flows. According to neoliberalism perspectives, free trade can be defined as a good way to allocate resources (capital, labor) to overcome the gap between developed and developing countries.

The US government has implement policy toward AGOA agreement to enhance productivity and competitiveness in Sub-Saharan Africa, however some beneficiary countries are struggle to achieve their profit. AGOA was criticized for the limitation of the agreement, it related to AGOA provision of trade facilitation tied with democracy and human right issue, oil trade is dominated meanwhile the objective of the agreement to enhance agricultural, textile and apparel commodity, AGOA membership system is considered as exclusive forum because the provision of beneficiary country too strict.

Keywords : African Growth and Opportunity Act (AGOA), America, Sub-Saharan Africa, Limitation of Agreement.

KATA PENGANTAR

Proliferasi perdagangan bebas pada hubungan internasional merupakan alasan bagi negara untuk tetap bekerjasama dalam menjaga perdamaian dunia. Di era milenial perdagangan bebas tidak hanya dilaksanakan oleh negara-negara pemilik modal namun juga melibatkan negara berkembang, dengan demikian muncul sebuah pola interaksi non-timbal balik dengan tujuan untuk mengimbangi ekonomi negara maju dan berkembang. *African Growth and Opportunity Act* (AGOA) merupakan salah satu kerjasama non-timbal balik yang dilakukan oleh AS dan Sub-Sahara Afrika yang bertujuan untuk membangun ekonomi melalui perdagangan bebas.

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi serta memberikan informasi terhadap pembaca, oleh karena itu apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 3 Oktober 2017

Penulis,

Nida Ujjannah Maulani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mmberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *Limitasi Perjanjian African Growth and Opportunity Act (AGOA) 2000-2015 dalam Pendekatan Ekonomi Amerika Serikat – Sub-Sahara Afrika*. Penelitian ini diajukan sebagai sidang skripsi yang merupakan syarat kelulusan dalam menepuh pendidikan Strata Satu dalam program studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Terselesaikannya penelitian ini juga tidak terlepas dari dukungan, dorongan serta bimbingan dari pihak-pihak yang terlibat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo sebagai Dekan FISIP Unpar
2. Mas Giandi Kartasmita, S.IP, M.A. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan serta membantu penulis dalam penyusunan penelitian
3. Orang Tua dan Keluarga atas kasih sayang, doa serta dukungan sehingga dapat memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian
4. M. Rizky Teja Pratama selaku rekan yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan semangat untuk penulis

5. Sahabat penulis Tara Rasasti dan Maria Dolorosa Victoria terima kasih atas kenangan suka dan duka, dukungan, serta kebersamaan selama 4 tahun berada di Unpar
6. Teman-teman program studi Hubungan Internasional angkatan 2013
7. Teman-teman Mentor Chevalier 2016 terima kasih atas pengalaman kerjasama dan rasa kekeluargaan selama berada di kampus Unpar
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstact	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.2.1. Pembatasan Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kajian Literatur	9
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian	26

1.7. Sistematika Penulisan	24
2. Pendekatan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Sub-Sahara Afrika dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi	27
2.1. Hubungan Amerika Serikat kepada Sub-Sahara Afrika	32
2.2. <i>African Growth and Opportunity Act</i> sebagai Landasan Kerjasama Ekonomi Amerika Serikat dan Sub-Sahara Afrika	37
2.2.1. Intergrasi Ekonomi <i>U.S.-Sub-Saharan Africa Trade and Economic Forum</i>	40
2.2.2. Proses Peninjauan dan Syarat Negara Penerima Keuntungan AGOA	41
2.3. Fokus Program <i>African Growth and Opportunity Act</i> dalam Perdagangan	45
2.3.1. Produk lokal Sub-Sahara Afrika memenuhi standard <i>Rules of Origin</i> (ROO)	47
2.3.2. Ketentuan produk tekstil dan pakaian	48
2.4. Mendorong Kerjasama dalam Sektor Investasi di negara AGOA	49
2.4.1. <i>Trade Capacity Building</i> Investasi Amerika Serikat dalam Meningkatkan Produktifitas Negara AGOA	51
3. Implementasi <i>African Growth and Opportunity Act</i> (AGOA) oleh Pemerintah Amerika Serikat di Kawasan Sub-Sahara Afrika	55
3.1. Target AGOA Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	56

3.1.1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Agrikultur	58
3.1.2. Memaksimalkan Keuntungan Sektor Pakaian dan Tekstil	59
3.1.3. Membangun Ekonomi Sub-Sahara Afrika melalui Investasi Sektor Privat	61
3.2. Realisasi program AGOA oleh Pemerintah AS	62
3.2.1. Program <i>Capacity Building</i> oleh USAID pada sektor Agrikultur	64
3.2.2. Investasi Penyediaan Infrastruktur oleh Millenium Challenge Corporation	66
4. Limitasi Perjanjian <i>African Growth and Opportunity Act</i> dalam Meningkatkan Ekonomi Sub-Sahara Afrika	68
4.1. Keterbatasan AGOA dalam Meningkatkan Perdagangan Sektor Agrikultur, Tekstil dan Pakaian	71
4.2. Keterbatasan Ketentuan AGOA dalam Penerimaan Hak Preferensi Perdagangan	77
4.3. Keterbatasan Ketentuan AGOA dalam Integrasi Ekonomi Regional	78
4.4. Hambatan Pemerintah AS dalam Merealisasikan AGOA	80
4.4.1. Hambatan Internal	80
4.4.1.1. Pro-Konstituensi Afrika	81
4.4.1.2. Kelompok Kepentingan Proteksionisme	83
4.4.2. Hambatan Eksternal	83

5. Penutup 88

5.1. Kesimpulan 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sub-Sahara Afrika	28
Tabel 1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sub-Sahara Afrika	29
Tabel 2.1 Dana Alokasi Pengembangan Kapasitas Perdagangan oleh Pemerintah AS pada Negara AGOA 2001-2013	52
Tabel 3.1 Luas Tanah Ladang dan Hasil Panen Kapas Kenya	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Negara Penerima Hak Preferensi AGOA	44
Gambar 2.1 Alokasi Dana USAID untuk Pengadaan Program <i>Trade Capacity Building</i> 2001-2013	65
Gambar 2.2 Alokasi Dana Millenium Challenge Corporation untuk Trade Capacity Building	67
Gambar 2.3 Impor Amerika Serikat terhadap Negara AGOA	70
Gambar 2.4 Perdagangan Sub-Sahara Afrika Terhadap Pasar Terbuka AGOA	72

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian, Identifikasi masalah yang berisi deskripsi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian literatur dan kerangka pemikiran sebagai penjabaran konsep dan pendekatan dari penelitian, serta metode dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sub-Sahara Afrika (SSA) merupakan kawasan di benua Afrika yang secara geografis tidak termasuk dalam bagian Afrika Utara terdiri dari 48 negara. Kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki kawasan ini sangat melimpah sehingga menjadi peluang untuk membangun SSA menjadi kawasan yang maju, berdasarkan data *World Bank* populasi penduduk di kawasan SSA pada tahun 2007 mencapai 800 juta jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya.¹ Akan tetapi, dengan modal yang ada tidak cukup membawa kesejahteraan bagi negara-negara SSA, bahkan diantaranya terdapat beberapa negara yang diklasifikasikan sebagai negara *Less Developed*

¹ The World Bank. *7 Facts About Population in Sub-Sahara Africa*.
<http://blogs.worldbank.org/africacan/7-facts-about-population-in-sub-saharan-africa>. Diakses pada 3 Oktober 2016

Countries (LDC).

Pengertian LDC menurut PBB adalah klasifikasi negara melalui struktur negara berkembang dengan meninjau aspek sosial-ekonomi, terdapat 3 kriteria yang bagi suatu negara dikategorikan sebagai LDC yaitu;

- Pendapatan negara yang dihitung melalui pendapatan perkapita atau PDB dibawah 1.085 USD/tahun
- *Human Asset Index* diukur dari berbagai aspek misalnya tingkat kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kelaparan, angka kelahiran, dsb.
- *Economic Vulnerability Index* yaitu pengukuran terhadap kondisi kerentanan negara mengalami resiko krisis ditinjau dari tujuh elemen; populasi penduduk, ekspor barang, pangsa pertanian, keterpencilan, kehutanan dan kelautan dalam PDB, pinjaman dana bagi korban bencana alam, ketidakstabilan dalam produksi sektor agrikultur, dan ketidakstabilan ekspor barang dan jasa.²

Ketiga kriteria tersebut menjadi parameter tingkat kesejahteraan negara menurut PBB, namun adapun aspek lain yang dapat dipertimbangkan sebagai elemen yang berpengaruh misalnya teknologi, infrastruktur, dan stabilitas politik. Melalui kriteria tersebut terdapat beberapa negara yang termasuk kedalam negara LDC di SSA seperti misalnya Lesotho, Ghana, dan Kenya.

² High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.
<http://www.unohrrls.org/UserFiles/File/LDC%20Documents/Advocacy%20brochure%20english%20for%20web.pdf>.

Salah satu peristiwa yang meninggalkan dampak besar bagi Sub-Sahara Afrika adalah krisis ekonomi pada tahun 1970-1980an karena hutang luar negeri yang melebihi anggaran belanja negara.³ Oleh karena itu, para pemimpin di Afrika sepakat untuk mendorong ekonomi terbuka melalui program pasar bebas.⁴ Momentum ini bertepatan dengan AS yang mulai membuka hubungan diplomatik yang lebih mendalam di kawasan Afrika. Apabila meninjau secara historis selama hubungan AS-Afrika menjadi suatu hal yang langka dibicarakan dalam dunia internasional karena notabene benua Afrika menjadi wilayah kolonialisasi Eropa pada abad 18-19. Inisiatif AS untuk membuka hubungan diplomatik dengan kawasan SSA dicetuskan oleh Presiden Clinton pada tahun 1997 ketika AS mengeluarkan kebijakan yang diadopsi dari *Uruguay Round Agreement Act* pasal 134 tentang *Africa Trade and Development Policy* untuk mengembangkan kerjasama ekonomi, dalam pasal 134 menyatakan bahwa:

*“The President should develop and implement a comprehensive trade and development policy for the countries of Africa.”*⁵

Sebagaimana tertuang pada pasal tersebut pemerintah AS berkomitmen untuk mendorong hubungan kerjasama ekonomi dengan Afrika melalui sektor perdagangan

³ Piet Konings (2001). *The Politics of Neoliberal Reform in Africa: State and Civil Society in Cameroon*. Langaa Reaserch and Publishing.

⁴ Ibid.

⁵ Uruguay Round Agreement Act, Section 134

disponsori oleh Kongres dan Presiden AS yaitu Willian Jefferson Clinton, pada era Presiden Clinton menjadi awal baru terbentuknya langkah kooperatif yang dituangkan dalam suatu forum kerjama yaitu *Partnership for Economic Growth and Opportunity in Africa* secara resmi menjadi sebuah lembaga yang menaungi kolaborasi antara SSA dan AS.⁶ Forum didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 oleh Presiden Clinton pencetus sekaligus sebagai startegi baru untuk menerapkan kebijakan negara AS untuk membantu membangun kesejahteraan di negara-negara LDC yang masih tertinggal, Presiden Clinton mengarahkan kebijakan ini kepada kawasan SSA sehingga beliau memutuskan untuk datang langsung ke beberapa negara Boswana, Uganda, Afrika Selatan, Ghana, Rwanda, dan Senegal untuk mengajak langsung pemimpin negara tersebut agar ikut serta dalam forum.⁷

Pada akhir putaran kedua masa jabatannya Presiden Clinton melakukan pembaruan pada Undang-undang terkait kebijakan untuk menjaga keamanan nasional *The National Security Directive on Africa Policy* (NSD 75) yang ditetapkan pada masa jabatan Presiden Bush, adanya instrument tersebut mempengaruhi Presiden Clinton dalam mengerahkan kebijakannya di Afrika. Tidak hanya dalam kolaborasi dalam bentuk material namun juga isu-isu yang berkaitan dengan moral, beberapa isu baru yang dinilai penting bagi Pemerintah AS yaitu menjaga perdamaian dunia,

⁶ USITC. U.S.-Africa Trade Flows and Effects of the Uruguay Round Agreements and U.S. Trade and Development Policy, Inv. 332-362

⁷ Ibid.

menyebarkan nilai-nilai demokrasi, stabilitas politik, pembangunan berkelanjutan, serta *good governance*.⁸ Oleh karena itu, isu-isu yang menjadi kepentingan AS dibuat agar menunjang kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dirancang lebih dinamis tujuannya untuk mengarahkan kebijakan fiskal agar menghilangkan anggaran defisit, menambah investasi dari sektor privat, berinvestasi dalam bidang pendidikan dan penelitian, dan membuka pasar untuk produk luar negeri agar tenaga kerja AS dapat bersaing di dalam pasar internasional.⁹ Keinginan untuk mengembangkan pasar tertuang dalam *Trade Development Act of 2000* resmi menjadi hukum publik oleh Presiden Clinton pada 18 Mei 2000. Presiden Clinton menyetujui Undang-Undang tersebut sebagai acuan bagi AS untuk melakukan liberalisasi perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah SSA. Pemerintah AS merealisasikan kebijakannya dengan merancang program *African Growth Opportunity Act (AGOA)*.

AGOA merupakan perjanjian untuk melaksanakan integrasi regional yang dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2000 oleh Presiden Clinton dengan 34 negara SSA.¹⁰ AGOA dibentuk atas dasar kepentingan AS dan SSA mencapai “mutual benefit” dengan cara menghilangkan pajak impor kepada negara SSA, membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penanaman modal, membangun kesejahteraan sosial serta menerapkan nilai demokrasi. Program kerjasama dirancang untuk

⁸ Ibid.

⁹ Nicholas Bouchet. *Democratic Promotion as US Foreign Policy: Bill Clinton and Democratic Enlargement*. (London: Routledge, 2015). Hal 115-116

¹⁰ Brock R. Williams. “*African Growth Opportunity Act (AGOA): Background and Reauthorization*”. <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43173.pdf>. Diakses 5 Oktober 2016

menciptakan perubahan sehingga SSA lepas dari status LDC dengan masa berlaku 15 tahun dari diresmikannya Undang-Undang mengenai AGOA, selain itu dibentuknya program kerjasama ini menjadi momentum untuk membuka hubungan diplomatik antara AS-SSA melalui langkah kooperatif membangun ekonomi di kawasan SSA.¹¹

1.2 Identifikasi Masalah

Kesepakatan perdagangan multilateral yang dilaksanakan oleh AGOA merupakan bentuk kerjasama dagang dengan asas non-resiprokal dalam artian pemerintah AS memberikan hak dagang istimewa berupa bebas kuota atau bebas tarif bagi produk yang diidentifikasi dalam standardisasi *Generalized System of Preference* (GSP).¹² Salah satu produk yang menjadi sasaran utama dalam program AGOA yaitu meningkatkan kualitas komoditas agrikultur, tekstil dan pakaian serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Sub-Sahara Afrika. Usaha pemerintah AS dalam menyempurnakan kerjasama tidak terhindar dari keterbatasan kapasitas perjanjian sehingga timbul spekulasi bahwa program AGOA tidak berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam menuntaskan kemiskinan.¹³

Salah satu negara anggota AGOA Afrika Selatan masih harus bekerja keras untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh

¹¹ Ibid.

¹² Niall Condon & Matthew Stern. *The effectiveness of African Growth and Opportunity Act (AGOA) in increasing trade from Least Developed Country*. (London: University of London, 2011).

¹³ Ibid.

Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan Rob Davies bahwa meskipun selama lima belas tahun telah menerima hak istimewa dan mendapatkan keuntungan karena program AGOA mampu menyerap tenaga kerja sebesar 62,000 jiwa namun hasil ini terlampau sangat kecil jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang tercatat oleh pemerintah sebesar 5,5 juta jiwa.¹⁴ Dilema negara-negara Sub-Sahara Afrika sebagai pihak penerima hak preferensi justru menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain syarat negara layak AGOA terlalu rumit karena berakitan erat dengan isu demokrasi dan HAM, arus modal yang bersumber dari investasi asing terhambat karena birokrasi yang lemah dan maraknya korupsi.¹⁵

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengangkat isu tentang adanya keterbatasan perjanjian African Growth and Opportunity Act (AGOA) dalam menuntaskan kemiskinan di Sub-Sahara Afrika. Perjanjian ini diratifikasi pada tahun 2000 dan telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu periode AGOA I tahun 2000-2002, selanjutnya periode AGOA II tahun 2002-2004 memodifikasi tentang ekstensi program preferensi hingga tahun 2015, periode AGOA III tahun 2004-2008, serta periode AGOA IV tahun 2008-2015.

¹⁴ Anna B. Wrobleka. *The Limits of AGOA in South Africa*.
<http://www.thisisafricaonline.com/Policy/The-limits-of-Agoa-in-South-Africa?ct=true>. Diakses 6 Oktober 2016

¹⁵ Ibid.

1.2.2 Perumusan Masalah

Penelitian yang disusun oleh penulis memiliki rumusan masalah yaitu “**Bagaimana limitasi perjanjian *African Growth Opportunity Act* (AGOA) 2000-2015 oleh Amerika Serikat dalam pendekatan ekonomi dengan Sub-Sahara Afrika?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hubungan kerjasama perdagangan antara dengan asas non-timbal balik sebagai asas fundamental melalui perjanjian antar kawasan Sub-Sahara Afrika dengan AS yaitu *African Growth and Opportunity Act* (AGOA). Tujuan utama AGOA yaitu untuk menuntaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, tetapi upaya pemerintah AS dalam implementasi tidak terhindar dari adanya keterbatasan perjanjian oleh pemerintah AS sebagai pihak penyedia yang memfasilitasi pembangunan ekonomi bagi negara berkembang di Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana limitasi AGOA oleh pemerintah AS dalam menjalankan program preferensi bagi negara-negara berkembang di kawasan Sub-Sahara Afrika dengan mengutamakan perdagangan dan investasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai hubungan unilateral Amerika Serikat dan Sub-Sahara Afrika dalam melakukan pasar terbuka serta kerjasama pada sektor investasi untuk menunjang perdagangan, terlebih lagi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang mendalami isu hubungan AS-SSA sebagai sumber informasi atau bahan referensi.

1.4 Kajian Literatur

Dalam buku “*Promoting US Investment in Sub-Sahara Africa*” yang ditulis oleh Roshen Hendrickson membahas tentang kebijakan AS sebagai strategi dan bantuan luar negeri dalam bentuk kooperatif dibidang ekonomi dan humanitarian, meskipun eksistensi AS di wilayah SSA baru muncul setelah abad 19an bukan berarti AS tidak memperhatikan SSA sebagai aktor yang berkontribusi dalam politik internasional.¹⁶ Buku ini menjelaskan keadaan di wilayah Sub-Sahara Afrika dimana sebagian besar negara bagiannya masih mengalami kemiskinan dan berupaya merubah kondisi ekonomi mereka yang tertinggal, menurut data Bank Dunia masyarakat SSA tergolong belum mapan secara finansial karena pendapatan yang diraih oleh setiap orang rata-rata kurang dari 1,25 USD/hari.¹⁷

¹⁶ Roshen Hendrickson. *Promoting U.S. Investment in Sub-Sahara Africa*. (London: Palgrave Macmillan, 2014).

¹⁷ Ibid.

Buku ini juga menjelaskan bagaimana *Trade Development Act of 2000* dapat diratifikasi menjadi hukum publik yang menjadi tonggak terbentuknya AGOA, program ini meliputi bantuan secara teknis dan finansial berupa modal bagi tenaga kerja dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi agar dapat berkompetisi dalam dunia internasional dan menunjang liberalisasi perdagangan sehingga yang bertujuan untuk menciptakan *free trade area* yang melibatkan AS dan kawasan Sub-Sahara Afrika.¹⁸

Dalam buku *African Regional Trade Agreement as Legal Regime* oleh James Thuo Gathii menjelaskan tentang eksistensi *Regional Trade Agreement* (RTA) penting bagi ekonomi dan politik Afrika. Menurut Gathii perkembangan RTA di Afrika berjalan kian pesat karena adanya faktor yang pemicu yaitu kondisi negara-negara afrika rentan terhadap konflik politik sehingga memengaruhi terhadap instabilitas ekonomi.¹⁹ Buku ini menjelaskan tentang tren RTA Afrika cenderung bersifat unik karena berbeda dengan tren RTA yang sebelumnya diterapkan dalam *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dimana perjanjian perdaganga mengikat anggotanya dan memengaruhi kebijakan nasional negara tersebut, RTA Afrika justru diciptakan sebagai rezim yang “fleksibel” dalam artian RTA yang mengacu kepada ciri-ciri sebagai berikut: (i) perjanjian yang tidak mengikat atau mengharuskan pihak terlibat untuk mencapai tujuan tertentu, (ii) mengadopsi beragam tujuan sosial, ekonomi, dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ James Thui Gathii. *African Regional Trade Agreement as Legal Regimes*. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2011)

politik (iii) RTA menunjukkan adanya preferensi yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama fungsional (iv) menunjukkan adanya keuntungan perdagangan bebas berdasarkan prinsip non-diskriminasi (v) kerjasama sama RTA seringkali ditandai dengan ‘spagheti bowl’ yaitu adanya keanggotaan ganda dan tumpang tindih. Menurut buku ini, AGOA menjadi salah satu RTA yang menjalankan kerjasama fungsional yang berorientasi terhadap peningkatan ekonomi, sosial dan politik dengan melaksanakan preferensi perdagangan.²⁰

Penulis menggunakan buku *A Grand Strategy for America* oleh Robert J. Art sebagai referensi untuk memaparkan konsep kepentingan nasional sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Kepentingan nasional menurut buku ini diartikan sebagai suatu hal dasar yang ingin diraih atau dicapai oleh suatu bangsa dimana kepentingan dapat mendorong suatu kebijakan atau strategi yang diambil oleh pemimpin negara.²¹ Penulis sepakat dengan buku ini bahwa kepentingan nasional AS yang berada diluar wilayah territorial negara dapat menunjang kebutuhan masyarakat seperti misalnya kepentingan dalam bidang ekonomi, pemerintah AS mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global oleh karena itu AS menerapkan sistem ekonomi terbuka.²²

Konteks ekonomi terbuka dalam buku ini diarahkan pada strategi pemerintah untuk membuka hubungan diplomasi dengan negara lain, terlebih lagi pada kerjasama

²⁰ Ibid.

²¹ Robert J. Art. *A Grand Strategy for America*. (USA: Cornel University Press, 2003).

²² Ibid.

ekonomi dalam skala regional. Strategi ini berkaitan dengan kepentingan krusial AS dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat seperti misalnya menjaga daerah yang memiliki energi atau minyak dan terbuka untuk kerjasama perdagangan dan investasi dengan regional lain.²³

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami limitasi perjanjian *African Growth and Opportunity Act (AGOA)* yang merupakan perjanjian kerjasama ekonomi antara AS dan Sub-Sahara Afrika memerlukan suatu kerangka pemikiran yang menjadi ‘alat’ untuk menganalisa isu dari sudut pandang studi hubungan internasional. Kerangka pemikiran berisikan teori atau konsep yang digunakan penulis untuk dapat menghasilkan hipotesa yang terstruktur. Berdasarkan kamus *Oxford*, limitasi merupakan suatu aturan atau keadaan yang membatasi.²⁴ Apabila dikaitkan dengan judul penelitian maka limitasi yang dimaksud adalah keterbatasan perjanjian *African Growth and Opportunity Act (AGOA)* dalam merealisasikan tujuan untuk memajukan ekonomi bersama kawasan Sub-Sahara Afrika.

Sedangkan, definisi untuk perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dinegosiasikan dan biasanya pihak yang terlibat terikat secara hukum terhadap suatu tindakan.²⁵

²³ Ibid.

²⁴ Oxford Dictionary. *Definition of Limitation*. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/limitation>. Diakses 8 Oktober 2016

²⁵ Oxford Dictionary. *Definition of Agreement*. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/agreement>. Diakses 8 Oktober 2016

Maksud perjanjian dalam penelitian ini adalah kesepakatan antara AS dan Sub-Sahara Afrika untuk mengadakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilembagakan secara hukum sebagai pendekatan ekonomi AS. Pendekatan ekonomi oleh pemerintah AS melalui AGOA berkaitan erat dengan kepentingan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dalam buku *National Management and International Economy* oleh M. Panic mengatakan integrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses menyatukan keberagaman menjadi kesatuan yang harmonis dengan maksud mengurangi kesenjangan sosial atau perbedaan secara geografis dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.²⁶ Selain itu, berintegrasi juga dapat meningkatkan kontrol nasional terhadap sarana produksi atau meningkatkan kapasitas lokal dalam barang dan jasa, dengan kata lain integrasi merupakan perilaku pemerintah untuk mengurangi hambatan perdagangan barang dan jasa serta untuk mengharmonisasikan kebijakan ekonomi nasional.²⁷

Stuart Holland berpendapat bahwa integrasi dipahami sebagai proses penyatuan itu sendiri yang mana memiliki intensi terhadap kepentingan ekonomi, ada beberapa tahap dalam integrasi ekonomi menurutnya yaitu (i) negara bergabung membentuk area perdagangan bebas dengan mengeliminasi pajak perdagangan ditujukan bagi negara yang terlibat, (ii) kebiasaan negara-negara berintegrasi memunculkan pajak eksternal

²⁶ M. Panic *National Management and International Economy*. (London: Macmillan Press, 1998).
Halaman 3-4

²⁷ Ibid.

namun pajak internal dihapuskan, (iii) terciptanya pasar tunggal dimana tidak ada batasan terhadap pergerakan barang dan jasa, (iv) membentuk serikat ekonomi yaitu negara-negara menyepakati untuk membuat kebijakan nasional yang diselaraskan dengan perjanjian yang telah dinegosiasikan pada bidang selain pajak, tenaga kerja, serta arus modal, (v) membantuk sistem ekonomi federalisme yaitu negara diberikan kebijakan oleh otoritas federal yang salah satunya merubah mata uang independen menjadi mata uang bersama.²⁸

Untuk menganalisa penelitian ini penulis menggunakan filosofi politik ekonomi internasional. Politik Ekonomi Internasional merupakan konsep yang dapat menjabarkan bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi dalam dunia internasional. Suatu proses yang mengaitkan antara kekuatan suatu negara dan kebijakan sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional disebut politik, kemudian ekonomi diartikan dengan bagaimana negara bertindak untuk memenuhi kepentingan ketika negara memiliki sumberdaya yang terbatas namun harus didistribusikan dengan baik untuk masyarakat sedangkan internasional yang dimaksud dalam konsep ketika negara akan saling berkomunikasi dan menghadapi isu-isu politik, ekonomi, dan sosial.²⁹ Menurut Robert Gilpin, negara dan pasar merupakan elemen yang penting dalam politik ekonomi internasional dengan maksud bahwa tanpa adanya negara sulit untuk membentuk mekanisme pasar, sebaliknya apabila tidak ada pasar maka negara

²⁸ Stuart Holland. *Uncommon Market: Capital, Class and Power in the European Community*. (London: Plagrave Macmillan, 1980). Halaman 49-50

²⁹ David N. Balaam & Michael Vesseth. *International Politics Economy* 2nd edition. (United Kingdom: Prentice Hall, 2001). Halaman 5-6.

hanya berfokus pada kepentingan politik saja menyebabkan kebutuhan ekonomi masyarakat tidak bisa terpenuhi, terlebih lagi besarnya kekuatan pasar mendorong arus barang, jasa, uang, dan modal menjangkau hingga pasar internasional oleh karena itu kekuatan pasar bisa merubah proses politik negara karena dapat menjadi sumber pembuatan kebijakan.³⁰

Definisi kepentingan, menurut Robert J. Art yang dipaparkan dalam buku *A Grand Strategy for America*, adalah aspirasi atau kebutuhan yang diinginkan oleh suatu bangsa terkait dengan lingkungan internasional.³¹ Sehingga kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai suatu yang harus dipenuhi negara untuk memenuhi kebutuhan bangsanya, kepentingan nasional merupakan elemen penting yang mendasari pemimpin negara untuk menentukan arah kebijakan.³² Kepentingan nasional AS seringkali bertentangan satu sama lain, oleh karena itu penting untuk membedakan kepentingan berdasarkan tingkat kebutuhan mana yang paling mendesak. Level kepentingan nasional diantaranya;

- Vital, merupakan kepentingan yang esensial atau kebutuhan yang harus dipenuhi dan apabila tidak tercapai maka akan menimbulkan efek tertentu yang dapat merugikan negara bahkan dapat membawa bencana. Seperti misalnya kepentingan terhadap keamanan nasional dimana pemerintah AS

³⁰ Patrick Cronin & Kishore C. Dash. *The Nature of Political Economy* dalam *International Political Economy* 2nd Edition, (Palgrave Macmillan, 2003).

³¹ Ibid.

³² Ibid.

menjamin kebutuhan rasa aman agar terhindar dari ancaman, serangan, dan invasi

- *Highly Important*, yaitu kepentingan yang harus diraih. Apabila kepentingan ini terpenuhi maka akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, tetapi jika kepentingan tidak tercapai maka tidak menimbulkan bencana. Pemerintah AS memiliki beberapa kepentingan ini misalnya mencegah, menghalangi dan mengurangi ancaman penggunaan nuklir dan senjata kimia di dunia, mencegah proliferasi sistem *Weapon Mass Destruction*, mencegah munculnya hegemon di kawasan lain terutama di Teluk Persia.
- *Important*, kepentingan nasional yang jika tidak tercapai maka dapat menyebabkan konsekuensi bagi pemerintah AS karena menyangkut pada kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya; kesejahteraan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan ekonomi diantara negara maju dan negara berkembang, mencegah konflik geografis, mempromosikan nilai pluralisme, kebebasan dan demokrasi.³³

Mengacu pada kepentingan nasional pada tingkat penting menyinggung kesejahteraan ekonomi dengan cara mengurangi kesenjangan yang berarti pemerintah AS berkepentingan untuk terbuka secara ekonomi terhadap dunia internasional, pengertian terbuka secara ekonomi ditujukan pada pengurangan atau hilangnya

³³ Ibid.

hambatan dalam pertukaran barang antar negara.³⁴ Selain ekonomi terbuka, kepentingan nasional mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dalam langkah kooperatif untuk itu pemerintah menyadari pentingnya interaksi ekonomi melalui integrasi.

Kecenderungan negara untuk bergabung dan membentuk forum interaksi dengan negara lain kini semakin meluas karena adanya kepentingan nasional yang dirasa belum terpenuhi, sehingga negara membuat kebijakan luar negeri yang relevan dengan lingkungan internasional. Interaksi diantara setiap negara dalam politik internasional tidak terlepas dari kepentingan negara dalam memenuhi kepentingan ekonomi negara masing-masing, untuk itu negara membentuk suatu pola kerjasama dalam integrasi.³⁵ Upaya penggabungan seringkali disertai dengan adanya perjanjian sebagai landasan hukum. Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 pasal 2 yaitu suatu kesepakatan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis yang diatur dalam hukum internasional, baik dalam instrument tunggal maupun lebih instrument yang berkaitan.³⁶

Petr Drulak dalam buku *The Quest of the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy* mengatakan konsep kepentingan dalam pendekatan realisme memiliki asumsi bahwa kepentingan nasional dicapai dengan cara yang agresif, maksudnya pendekatan ini memandang bahwa kepentingan nasional

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Konvensi Wina 1969.

merupakan sesuatu yang tidak bisa digantikan dan sangat berperan penting bagi kelangsungan negara sehingga negara harus melakukan berbagai cara untuk mencapainya.³⁷ Akan tetapi, menurut Martha Finnemore konsep kepentingan dapat dipahami dari perspektif neoliberalisme yang berasumsi bahwa negara dapat berinteraksi dan menerima tentang norma, nilai dan persepsi mengenai konsep kepentingan melalui integrasi, dengan kata lain kepentingan nasional tidak lagi dicapai dengan cara yang agresif tetapi lebih mengedepankan terhadap kerjasama fungsional yang menjadi tendensi negara-negara untuk berintegrasi.³⁸

Neoliberalisme merupakan teori yang terlahir dari teori liberalisme klasik.³⁹ Neoliberalisme lahir sebagai pemikiran yang yang populer pada sekitar tahun 1950an dimana pada masa itu tendensi negara untuk bergabung dan mendirikan forum integrasi regional sehingga kerjasama fungsional semakin meluas dan menyentuh berbagai isu seperti misalnya perdagangan dan investasi, isu perjalanan dan komunikasi, serta isu terkait demokrasi.⁴⁰ Filosofi neoliberalisme memiliki asumsi bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan tingkat politik dan ekonomi. Adapun pemikiran fundamental dalam neoliberalisme menurut Olssen dan Petters, yaitu:

³⁷ Petr Durlak. *The Quest of the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy*. (Oxford: Peter Lang, 2010).

³⁸ Martha Finnemore. *International Interest in International Society*. (New York: Cornell University Press, 1996).

³⁹ Robert Jackson & Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approach* (United Kingdom: Oxford Press, 2010). 46-47

⁴⁰ Ibid.

- **Ekonomi pasar bebas**, pasar merupakan cara terbaik untuk mengalokasikan sumberdaya dan peluang. Pasar juga memiliki keunggulan dalam segi mekanisme efisiensi dan mekanisme moral
- **Prinsip laissez-faire** dimana pasar bebas adalah mengatur jalannya regulasi itu sendiri sehingga campur tangan pemerintah dianggap tidak berpengaruh terhadap arus bebas pasar.
- **Berkomitmen terhadap perdagangan bebas** yang melibatkan penghapusan tarif atau subsidi atau perlindungan lainnya yang diterapkan oleh negara serta mendukung ekonomi terbuka.⁴¹

Perspektif neoliberalisme meyakini bahwa dengan pasar bebas maka sumberdaya dapat disebarakan dengan baik dan apabila ada keterbatasan sumberdaya maka kekuatan pasar mengantarkan negara kepada keterbukaan pada negara lain hingga terjadi hubungan timbal balik. Hubungan ini ditunjang dengan teknologi dan infrastuktur menjadikan pertukaran barang dan jasa semakin mudah, pada akhirnya negara memutuskan untuk berfokus melakukan liberalisasi perdagangan dan membentuk suatu forum kerjasama. Skema perdagangan internasional menghubungkan negara pemilik modal yang notabene adalah negara maju (“North”) dengan negara berkembang (“South) sehingga hubungan timbal balik berubah menjadi **asas non-**

⁴¹. Mark Olssen & Michael A. Peters. Hal. 314-315

resiprokal.⁴² Menurut L. Kruger dalam buku *Global Transformations and World Future* oleh pendekatan *North-South* menunjukkan bahwa ada kesenjangan antar negara ditinjau dari faktor modal produksi, pembagian tenaga kerja dan mekanisme pasar di dalam sistem internasional modern.⁴³ Adapun beberapa faktor yang mendukung hubungan *North-South* semakin berkembang yaitu;

- Kesalahan dalam kebijakan domestik oleh pemerintah berdampak sulit mempertahankan kestabilan ekonomi akibat adanya modernisasi contohnya; kurangnya konsentrasi pemerintah dalam menunjang pendidikan dasar sehingga tenaga kerja yang tersedia tidak cukup memiliki kemampuan dan keahlian, pengembang teknologi dalam aktifitas produksi.
- Rostow mengatakan kesiapan yang tidak matang dalam menghadapi modernisasi mengakibatkan negara LDC sulit untuk *self-sufficient*, masyarakat tradisional dipaksa harus mengikuti lingkungan modern sehingga masyarakat mengalami dilema dengan keberadaan lingkungan yang terus berkembang.
- Hubungan North-South menciptakan *mutual benefit* melalui pertukaran modal atau *Foreign Direct Investment (FDI)*.⁴⁴

⁴² Ibid.

⁴³ Soheil Tahir Inayatullah. *Global Transformation and World Future Vol. I. North-North, South-South, North-South Relations*. (United Kingdom: Eolss Publishers, 2009).

⁴⁴ Ibid.

North-South dalam konstelasi politik dunia merupakan pola kerjasama modern yang mulai berkembang di akhir abad 19. North-South seringkali ditandai dengan dibentuknya *Regional Trade Agreement (RTA)*.⁴⁵ RTA secara umum dapat dipahami sebagai integrasi negara berdasarkan kedekatan secara geografis untuk mencapai tujuan bersama, akan tetapi makna RTA saat ini telah meluas karena adanya kepentingan ekonomi politik.⁴⁶ Menurut Miroslav N. Jovanovic dalam buku *International Handbook on the Economics of Integration, Volume I* ada beberapa karakteristik dari RTA:

- Negara menjadikan RTA sebagai komponen penting dalam kebijakan perdagangannya karena adanya keterbatasan sumberdaya sehingga negara cenderung melakukan perjanjian preferensi
- Pada umumnya RTA meningkatkan rasa ambisi negara pada perdagangan dan kebijakan yang diterapkan negara tersebut, oleh karena itu biasanya dalam RTA terdapat liberalisasi perdagangan barang atau jasa yang mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara.
- Hubungan geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya alasan untuk berintegrasi karena adanya faktor ekonomi dapat memperluas integrasi menjadi extra-regional

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

- Adanya perkembangan di seluruh wilayah global menimbulkan inisiatif untuk berkonsolidasi dan meningkatkan hubungan intra-regional.⁴⁷

Hubungan North-South relation ditandai dengan adanya perjanjian preferensi perdagangan diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang dengan sistem non-resiprokal melalui *Generalized System Preference (GSP)*.⁴⁸ GSP merupakan program pemberlakuan tarif preferensial yang dirancang khusus bagi negara LDC untuk komoditas tertentu agar memicu kenaikan angka ekspor atau dapat diartikan sebagai pengaturan dalam perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama. Menurut Suspachai Panitchpakdi, Sekjen U.N Conference on Trade and Development, GSP dapat diartikan sebagai:

*The (Generalized System of Preference) was established on the basis of the economic theory that preferential tariff rates in developed-country markets could promote export-driven industry growth in developing countries. It was believed that this, in turn, would help free beneficiaries from heavy dependence on trade in primary products, the slow long-term growth and price stability of which contributed to chronic trade deficit. It was thought that only the larger markets of industrialized trading partners were big enough to provide the economic stimulus needed to attain these goals.*⁴⁹

⁴⁷ Miroslav N. Jovanovic. *International Handbook on the Economic of Integration, Vol. I.* (United Kingdom: Edward Ligar Publisher, 2011).

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Robert J. Carbaugh. *International Economic. Trade Policies to Developing Nations.* (United State of America: Cengage Learning., 2010)

GSP pertama kali digunakan dalam WTO sebagai bentuk kerjasama tanpa timbal balik maksudnya kerjasama ini merupakan keistimewaan untuk menstimulus ekonomi negara LDC.⁵⁰ GSP diterapkan pada LDC dengan memberikan pengurangan atau pembebasan pajak, menanamkan modal usaha untuk mendorong industri negara berkembang melalui pengurangan tarif dalam perdagangan, meskipun tidak di landasi dengan hubungan resiprositas namun hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara-negara yang ikut serta menyetujui kerjasama ini.⁵¹

AS telah menerapkan GSP sebagaimana dituangkan pada *Trade Act 1974* yaitu seperangkat aturan mengenai perlakuan khusus bagi negara miskin agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menghilangkan kesenjangan ekonomi melalui kerjasama perdagangan dengan pengurangan harga pajak atau hambatan bagi barang impor, sistem ini berlaku bagi setiap produk telah tercantum pada daftar produk GSP dan terdapat 5000 jenis produk impor asal dari negara-negara yang sebelumnya telah diakui oleh Pemerintah AS untuk mendapatkan perlakuan khusus akan dikenakan pengurangan pajak.⁵²

Sama halnya dengan GSP yang berlaku untuk negara LDC, GSP dalam AGOA pun mengadopsi sistem ini sebagai prosedur pelaksanaan ekspor-impor barang yang diatur oleh pemerintah AS dengan menyertakan seperangkat aturan standar produk

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² James Thuo Gathii. *African Regional Trade Agreement as Legal Regimes*. (New York: Cambridge Press, 2011). Halaman 403-404

sektor non-oil akan dikenakan bebas pajak dan hambatan sektor tersebut dapat berupa pertanian dan perikanan tetapi apabila produk tersebut tidak terdaftar kedalam produk GSP maka akan dikenakan tarif normal.⁵³ Awal mula GSP berjalan produk yang terdaftar sekitar 1,800 barang namun hingga tahun 2008 terdapat 6,400 produk agrikultur dan manufaktur dari produsen SSA terdaftar layak untuk dijual di pasar AS sehingga produk bebas hambatan. Namun, GSP dalam AGOA memiliki keunikan yaitu adanya ketentuan khusus bagi produk pakaian dan tekstil.⁵⁴

1.6 Metode Penelitian

Untuk memaparkan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sebagai proses analisa kausalitas dari masalah. Berdasarkan buku *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers* oleh Jane Ritchie & Jane Lewis metode kualitatif merupakan suatu cara, proses, interpretasi dan observasi suatu fenomena sosial berdasarkan kejadian terhadulu atau pengalaman agar menjadi pembelajaran bagi masa mendatang.⁵⁵ Penelitian sosial memiliki metode guna mengobservasi atau mengkaji suatu fenomena sosial berdasarkan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu pengumpulan data dalam penelitian dengan tujuan menjelaskan suatu peristiwa sosial melalui pendekatan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Jane Ritchie & Jane Lewis. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science and Researchers*. (London: Sage Publication, 2003), 50-52

atau teori.⁵⁶ Oleh karena itu penulis melakukan studi literatur, artikel, dan jurnal sebagai data yang menjadi sumber dalam penelitian ini.

Penulis setuju dengan pengertian metode kualitatif dapat menjelaskan fenomena sosial dengan mempertimbangkan faktor historis sebagai acuan untuk meneliti masalah di kemudian hari. Historis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah AS yang menjadi acuan terhadap aksi atau tindakan guna mencapai kepentingan nasional, misalnya program AGOA dapat terlaksana sebagai wujud pelaksanaan kebijakan AS.⁵⁷ Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach* penelitian dengan menggunakan cara kualitatif adalah mengidentifikasi masalah sosial yang terjadi pada individu atau sekelompok masyarakat dengan memperhitungkan sejarah. Teknik pengumpulan didapatkan melalui literatur, artikel, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan gambar, tabel, grafik, atau interpretasi personal mengenai suatu gejala sosial yang diolah menjadi pemaparan deskriptif untuk menjelaskan kausalitas fenomena tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. (London: Sage Publication, 2002) 13-14

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya saling berkorelasi. Bab I membahas mengenai pendahuluan dari penelitian terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pendekatan pemerintah AS kepada Sub-Sahara Afrika guna meningkatkan kerjasama ekonomi dengan perjanjian preferensi perdagangan, menjelaskan hubungan diplomatik AS dan Sub-Sahara Afrika, AGOA sebagai landasan kerjasama ekonomi AS - Sub-Sahara Afrika, fokus program AGOA pada perdagangan dan investasi.

Bab III menjelaskan tentang penerapan AGOA oleh pemerintah AS di Sub-Sahara Afrika, target AGOA dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Sub-Sahara Afrika yaitu untuk meningkatkan daya saing agrikultur dan memaksimalkan keuntungan bagi sektor pakaian dan tekstil serta membangun ekonomi melalui investasi sektor privat, serta realisasi program AGOA

Bab IV membahas mengenai limitasi perjanjian AGOA dalam meningkatkan ekonomi Sub-Sahara Afrika dan hambatan yang dialami oleh perjanjian AGOA.

Bab V yang berisi kesimpulan.